

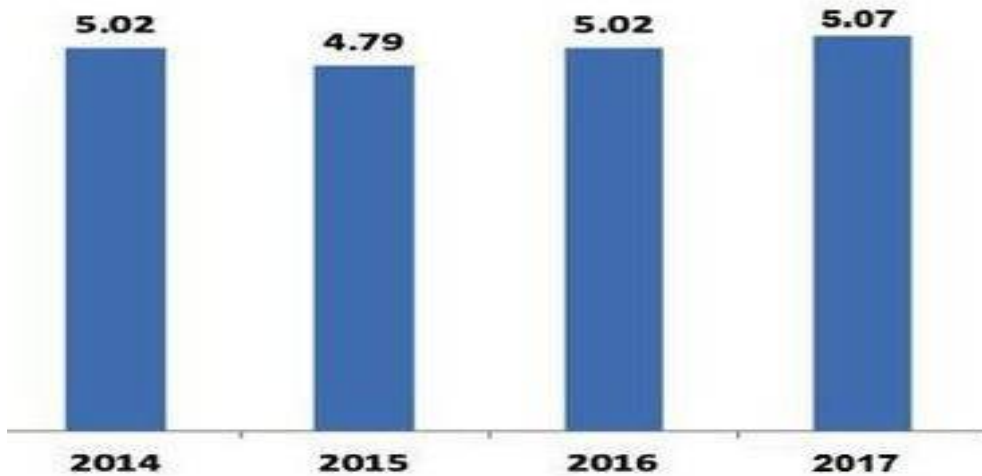


# Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas

*Disampaikan dalam*  
**Musyawarah Perencanaan Pembangunan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
*5 April 2018*

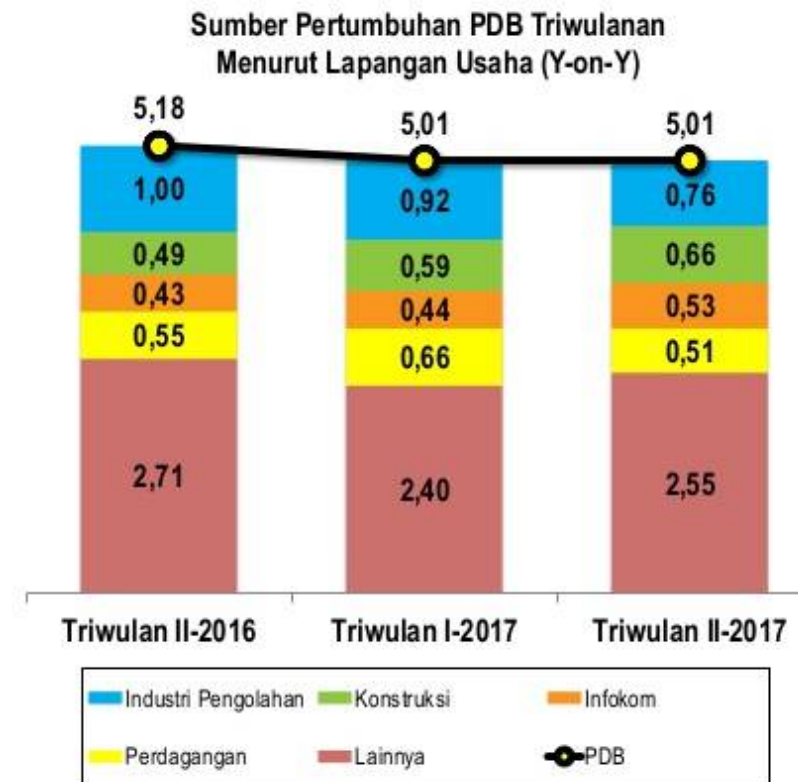


# PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA



Sumber: BPS

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2014-2017  
(dalam persen)





## INDONESIA DAPAT TERJEBAK DALAM MIDDLE INCOME TRAP

**Indonesia**  
peringkat ke-36 dari 137 negara

***Global Competitiveness* 2017-2018**

**Berada di bawah**

Singapura (peringkat ke-3),  
Malaysia (peringkat ke-23) dan  
Thailand (peringkat ke-32)

**Perekonomian Indonesia masih  
kalah dengan Filipina, India dan  
Vietnam**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia  
juga **dikalahkan oleh** Filipina, India  
dan Vietnam yang berhasil  
membukukan pertumbuhan ekonomi  
di atas 6 persen pada 2017





## MENGAPA TERJEBAK DALAM MIDDLE INCOME TRAP?

**1** Faktor rendahnya daya dukung infrastruktur

**2** Birokrasi yang in-efisien

**3** Rendahnya kualitas SDM

**4** Ketidakberdayaan membangun kemandirian pangan

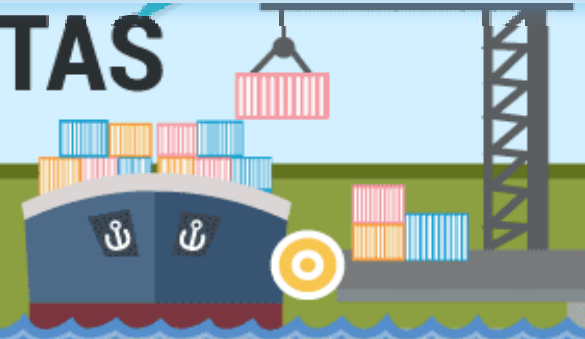
**5** Kurangnya perlindungan sosial bagi masyarakat





FOKUS PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

# INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS



## AKSESIBILITAS

Dukungan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal

## KONEKTIVITAS

Pengembangan Jalur Utama Domestik dan Integrasi antar Moda

## TRANSPORTASI PERKOTAAN

Pengembangan Angkutan Massal dan Jalan Perkotaan





# PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MASIH PRIORITAS JOKOWI

Pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu sasaran prioritas 2018. Targetnya konektivitas antarwilayah semakin membaik dan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tercapai.



**BELANJA INFRASTRUKTUR PADA RAPBN 2018**

# Rp 409 triliun

↑ 5,6% dibanding Rp 387 triliun pada APBNP 2017

**INFRASTRUKTUR EKONOMI**  
**Rp 395 triliun**

**INFRASTRUKTUR SOSIAL**  
**Rp 9 triliun**

**DUKUNGAN INFRASTRUKTUR**  
**Rp 5 triliun**

## KONEKTIVITAS



Jalan  
**865 km**



Bandar Udara  
**6**



Pelabuhan  
**15 lokasi**



Jalur Kereta Api  
**639 km**



Telekomunikasi/  
Broadband Nasional  
**57 kab/kota**

## KEDAULATAN PANGAN



Jaringan Irigasi Baru  
**54.000 ha**



Bendungan  
**47 unit**

## PERUMAHAN, AIR MINUM, DAN SANITASI



Rumah Susun  
**6.238 unit**



Rumah Swadaya  
**180.000 unit**



## ELEKTRIFIKASI LISTRIK

Rasio Elektrifikasi  
**95,2%**



**PRESIDEN JOKO WIDODO**

“Belanja diarahkan untuk pendanaan program prioritas, utamanya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan”

Sumber : Pidato Presiden Joko Widodo saat membacakan Nota RAPBN 2018 di sidang paripurna DPR 16 Agustus 2017



**Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi**

Sumber : *World Development Report* milik *World Bank*



# ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI

## Money Follow Program

Alokasi anggaran harus digunakan untuk untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)

## e-Government

Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik



## Stop Pemborosan Anggaran

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai

## Fokus Kinerja bukan SPJ

ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ

Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting

Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan

Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat



# PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

## HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATEGORI		Kementerian/ Lembaga			Pemerintah Provinsi			Kabupaten / Kota		
Kategori	Range Nilai	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AA	90-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	80-90	4	4	5	2	3	4	1	2	2
BB	70-80	21	27	30	7	7	6	7	10	30
B	60-70	36	37	42	8	12	19	31	57	139
CC	50-60	16	11	2	13	10	5	172	199	174
C	30-50	0	3	3	3	2	0	239	193	135
D	0-30	0	0	0	1	0	0	14	14	3



Mengambarkan kemampuan instansi dalam:

- Mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran
- Menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas
- Menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung

## Rata-Rata Nilai



Nilai Efisiensi 2017

± 5,47 T

dari 7 K/L

± 35,68 T

dari 118 Pemerintah Daerah

± 41,15 T

TOTAL

## EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:

- Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
- Upaya cross-cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi.



## e-Performance Based Budgeting



Akuntabilitas Kinerja

**e-Budgeting**



- Mencegah program/ kegiatan "siluman" dan mencegah penyimpangan



- Mencegah pemborosan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran



- ASN tidak disebutkan dalam pekerjaan dokumentatif namun berfokus pada kinerja yang akan diwujudkan

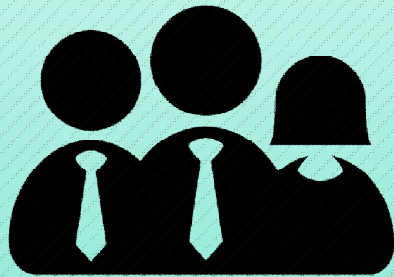


## Hasil Evaluasi SAKIP 2017

No	Pemerintah Daerah	2016		2017	
		Nilai	Predikat	Nilai	<u>Predikat</u>
1.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61,83	B	63,65	B
2.	Kab. Bangka	58,52	CC	66,77	B
3.	Kab. Bangka Barat	60,24	B	65,45	B
4.	<u>Kab. Bangka Selatan</u>	42,88	C	61,71	B
5.	Kab. Bangka Tengah	65,02	B	67,20	B
6.	Kab. Belitung	47,04	C	47,04	C
7.	Kab. Belitung Timur	50,60	CC	57,77	CC
8.	Kota Pangkalpinang	52,21	CC	60,40	B



# “Tidak ada pembangunan tanpa kontribusi dari birokrasi”



### Reformasi Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)

- Memiliki kompetensi yang tinggi sesuai bidangnya. ASN harus memiliki pengetahuan, kemampuan bidang dan kemampuan teknis setidaknya sama dengan penyedia jasa konstruksi atau infrastruktur. Posisi tawar antara pemerintah dengan pihak penyedia jasa haruslah seimbang.
- Memiliki integritas yang tinggi
- Sistem rekrutmen SDM harus dilakukan dengan asas sistem merit.



### Deregulasi dan debirokratisasi

Debirokratisasi dan deregulasi dilakukan untuk memangkas berbagai hambatan pengaturan dan birokrasi dengan tujuan meningkatkan minat investasi di daerah



### Sistem pembiayaan

Mampu berkolaborasi dengan masyarakat melalui pencarian berbagai alternatif pembiayaan dari masyarakat



## REFORMASI BIROKRASI UNTUK Mendukung Pembangunan



### **Peningkatan sistem pengawasan**

Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana, terhindar dari resiko-resiko terburuk dan memenuhi kualitas yang direncanakan



**Sekian dan Terima Kasih**